



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JL. KEMIRI No: 27 Telp. (0414) 22447

Benteng, 92812

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 03 / I / TAHUN 2025**

T E N T A N G

**PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
LINGKUP BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas Pelaksanaan Program / Kegiatan Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (lembaran Negara Tahun 1959 No. 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan /atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintah diantara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
18. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

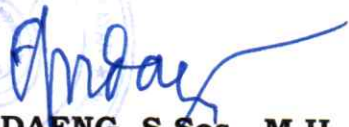
1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan teknis kegiatan / sub kegiatan yang meliputi:
 - a. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan
 - b. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan
 - c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan

2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan yang meliputi:
 - a. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan
 - b. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan
 - c. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan
3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang / jasa pada kegiatan / sub kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang / jasa.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Benteng
 Pada Tanggal : 5 Januari 2025

**a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK**


Hj. ANDI DAENG, S.Sos., M.H.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19681216 199003 2 007

Tembusan : Kepada Yth;

1. Kepala Bappelitbangda di Benteng;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah di Benteng;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan SETDA di Benteng;
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan SETDA di Benteng.

Lampiran : Keputusan Bupati Kepulauan Selayar
Nomor : 03 /I/Tahun/2025
Tanggal : 05 Januari 2025

DAFTAR NAMA - NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PPTK	KETERANGAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD	ROSLAENI, A.Md Pangkat : Penata Muda Tk.I, II/b Nip. 19760516 201101 2 002 ROSLAENI, A.Md Pangkat : Penata Muda Tk.I, II/b Nip. 19760516 201101 2 002 ROSLAENI, A.Md Pangkat : Penata Muda Tk.I, II/b Nip. 19760516 201101 2 002	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PPTK	KETTERANGAN
	1.1.4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.3.1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ROSLAENI, A.Md Pangkat : Penata Muda Tk.I, II/b Nip. 19760516 201101 2 002 ROSLAENI, A.Md Pangkat : Penata Muda Tk.I, II/b Nip. 19760516 201101 2 002 ROSLAENI, A.Md Pangkat : Penata Muda Tk.I, II/b Nip. 19760516 201101 2 002 ROSLAENI, A.Md Pangkat : Penata Muda Tk.I, II/b Nip. 19760516 201101 2 002 ROSLAENI, A.Md Pangkat : Penata Muda Tk.I, III/d Nip. 19770617 200901 2 004 ROSLAENI, A.Md Pangkat : Penata Muda Tk.I, II/b Nip. 19760516 201101 2 002	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PPTK	KETTERANGAN
1.4.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 1.4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 1.4.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.5.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.5.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		NURDIAH DS, S.E. Pangkat : Penata Tk.I, III/d Nip. 19770617 200901 2 004	
		NURDIAH DS, S.E. Pangkat : Penata Tk.I, III/d Nip. 19770617 200901 2 004	
		NURDIAH DS, S.E. Pangkat : Penata Tk.I, III/d Nip. 19770617 200901 2 004	
		NURDIAH DS, S.E. Pangkat : Penata Tk.I, III/d Nip. 19770617 200901 2 004	
		NURDIAH DS, S.E. Pangkat : Penata Tk.I, III/d Nip. 19770617 200901 2 004	

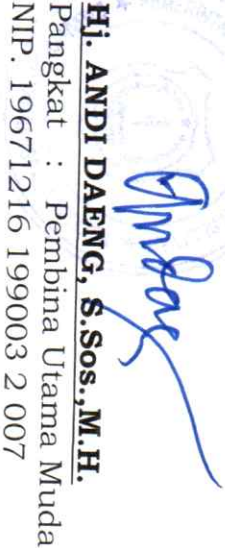
NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PPTK	KETERANGAN
	1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.6.1 Penyediaan dan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.6.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	NURDIAH DS, S.E. Pangkat : Penata Tk.I, III/d Nip. 19770617 200901 2 004 NURDIAH DS, S.E. Pangkat : Penata Tk.I, III/d Nip. 19770617 200901 2 004 NURDIAH DS, S.E. Pangkat : Penata Tk.I, III/d Nip. 19770617 200901 2 004	
2.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		
	2.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2.1.1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	ANDI SRI YULIANI, S.E.,M.M. Pangkat : Penata Tk.I, III/d Nip. 19740729 200701 2 001	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PPTK	KETERANGAN
	2.1.2 Pembentukan Paskibraka	ANDI SRI YULIANI, S.E.,M.M. Pangkat : Penata Tk.I, III/d Nip. 19740729 200701 2 001	
3.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 3.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik , Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantapan Situasi Politik		
	3.1.1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik , Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantapan Situasi Politik di Daerah	Hj. APRIANA SUSILAWATI, S.E.,M.M. Pangkat : Pembina, IV/a Nip. 19830403 201101 2 013	
4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 4.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 4.1.1 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Hj. APRIANA SUSILAWATI, S.E.,M.M. Pangkat : Pembina, IV/a Nip. 19830403 201101 2 013	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PPTK	KETERANGAN
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		
	5.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 5.1.1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	ANDI SRI YULIANI, S.E., M.M. Pangkat : Penata Tk.I, III/d Nip. 19740729 200701 2 001	
6.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		
	6.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 6.1.1 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	SUHARDI, S.Sos. Pangkat : Pembina, IV/a Nip. 19670920 199203 1 016	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PPTK	KETERANGAN
	6.1.2 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	SUHARDI, S.Sos. Pangkat : Pembina, IV/a Nip. 19670920 199203 1 016	

a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK,



Hj. ANDI DAENG, S.Sos.,M.H.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19671216 199003 2 007